

Proyek Jalan Asal Jadi di Unit Kebun Hatonduhan Simalungun, PT JMP Rekanan PTPN IV Medan Makin Eksis

Amry Pasaribu - SIMALUNGUN.INDONESIASATU.CO.ID

Mar 8, 2021 - 20:07



Asal Jadi Proyek Jalan Dikerjakan Rekanan PT Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Hatonduhan, Kabupaten Simalungun

SIMALUNGUN- Investasi PT (Persero) Perkebunan Nusantara IV berupa

peningkatan sarana fisik, infrastruktur jalan utama yang dikerjakan **PT Jaya Mega Perdana** pada bulan Juni tahun 2020 lalu, kini tak lagi dirasakan manfaatnya di lokasi Unit Kebun Hatonduhan, Nagori Tonduhan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Senin (08/03/2021) sekira pukul 11.00 WIB.

Pasalnya, jalan utama dengan lebar 2 meter, kondisinya tidak rata, berbahan material batu koral disusun sepanjang +/- 5 kilometer dari Simpang Hantonduhan hingga ke arah Afdeling II di lokasi Unit Kebun Hatonduhan, saat ini tak lagi berbentuk jalan, kondisi batu koral dengan ukuran tidak standart yang semula tersusun kini telah berserakan.



"Akibat dikerjakan asal jadi oleh pihak vendor tidak sesuai dengan RKS dan spek teknisnya. Penggunaan uang perusahaan BUMN perkebunan kelapa sawit itu sengaja dihambur-hamburkan, vendor bekerja asal-asalan dan ini akibat Managemen Unit Hatonduhan selaku penerima manfaat dinilai masa bodoh dan apatis terhadap kepentingan perusahaan dan masyarakat," kata Rio Damanik salah seorang penggiat sosial kontrol di Simalungun, di lokasi.

Dia juga mengatakan, di wilayah perkebunan tanaman kelapa sawit berplat merah itu dikelola oleh Kementerian BUMN RI dengan semboyan "Akhlik" tidak berlaku bagi jajaran Managemen PTPN IV Medan. Hal ini telah dibuktikan, hasil kerja pihak rekanan tidak sesuai dan jauh dari harapan yang akhirnya berimbas kepada masyarakat, sebab fungsi jalan itu juga lintasan bagi warga.

"Seharusnya Managemen Unit Kebun Hatonduhan menyadari bahwa di sekitar wilayah perkebunan tanaman kelapa sawit ini begitu banyak masyarakat yang juga menerima manfaat pembangunan. Jalan dibangun berbiaya tinggi, dikerjakan vendor tanpa pengawasan oleh pihak unit kebun Hatonduhan seharusnya Direktur PTPN IV respect terhadap informasi yang disampaikan melalui media massa, tidak perlu alergi," ucap Damanik tegas.



Terpisah, menurut Ketua Investigasi Lembaga Pemerhati Pembangunan dan Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera Utara Robert Indra Girsang melalui pesan selularnya menyebutkan, soal pengerjaan jalan utama sepanjang +/- 5 kilometer sejak awal dikerjakan tidak sesuai standart RKS dan Spek Teknis oleh pihak rekanan PTPN IV yakni PT JMP dengan biaya miliaran rupiah.

"Peningkatan sarana jalan dilakukan PTPN IV seharusnya mendatangkan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat setempat. Seperti itu, pastilah perusahaan merugi, anggaran sudah digelontorkan namun hasil yang didapat sangat mengecewakan di proyek pengerasan jalan Afdeling 2 menuju ke Kantor Sentral PTPN IV Kebun Hatonduhan," tulis Robert dalam pesan percakapan diterima [Jurnalis Indonesiasatu.co.id](http://JurnalisIndonesiasatu.co.id), Senin (08/03/2021) sekira pukul 19.24 WIB.



Selanjutnya, Robert Girsang mengutarakan, Tim Konsultan dan Bagian Fungsional teknik kantor pusat PTPN IV Medan tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan maksimal, tidak ada penyelesaian terhadap hasil kerja pihak

rekanan. Terkait rekanan pemenang tender proyek itu, menurut Robert lebih lanjut, indikasinya ada dugaan keterlibatan pejabat PTPN IV memuluskan proses lelang dan terjadi pembiaran terhadap pihak rekanan.

"Kesannya ini sengaja didiamkan, dikarenakan ada oknum yg membekingi, maka jajaran Manajemen semuanya diam, padahal sudah sepatasnya pihak rekanan PT Jaya Megah Perdana telah blacklist sebab melanggar kesepakatan kontrak dan tidak mengindahkan peraturan," sebutnya.

Robert melanjutkan, pihaknya telah menelusuri permasalahan proyek jalan PTPN IV dan berdasarkan hasil Investigasi, Ia menyampaikan, bahwa kegiatan pekerjaan di lokasi Afdeling 2 Kebun Hatonduhan itu sangat buruk, sehingga dana retensi sebesar 10% tidak mampu lagi menutupi pekerjaan yaitu kewajiban perawatan dan ini tidak dilakukan rekanan tersebut.



"Biaya untuk perawatan nilainya lebih tinggi dari jaminan pemeliharaan dan masih di PTPN IV Medan dana itu. Maka, rekanan tidak berkeinginan menyelesaikan kontrak melakukan pemeliharaan, kenapa hal ini dibiarkan ? dan lebih parah lagi, untuk tahun 2021 ini PT Jaya Megah Perdana justru merajai pasar lelang paket proyek di PTPN IV," kata Robert.

Ditambahkan, pihaknya menilai kinerja Tim Konsultan (Muliadi ; red) sangat diragukan kemampuannya bekerja melakukan pengawasan maksimal. Sementara, hal yang sama dilakukan oleh tim pengawas internal disebut SPI itu, dinilai tidak efektif tupoksinya sebagai perpanjangan tangan direktur PTPN IV dalam hal pengawasan.

"Kaitannya, karena ada orang penting di belakang vendor PT Jaya Mega Perdana, disinyalir oknum petinggi yang berkantor di Medan. Sehingga semua jajaran dan komponen perusahaan bungkam, layak diduga bahwa uang negara telah disalahgunakan jajaran manajemen PTPN IV Medan atau **"Korupsi Massal"** dalam bahasa kerennya ya Lae," pungkas Robert.

Image not found or type unknown



Hingga berita ini dilansir kepada publik, Direktur PTPN IV Medan Sucipto Prayetno melalui Manager Kebun Unit Hatonduhan Jon Bangun tidak menanggapi ketika dikonfirmasi terkait tanggung jawab dalam hal pengawasan pihaknya selaku penerima manfaat.

Alokasi anggaran perusahaan berupa proyek pengerasan dan peningkatan jalan utama menuju ke Kantor Kebun Hatonduhan yang merupakan lintasan dilalui kendaraan setiap saat, dalam tempo enam bulan telah mengalami kerusakan.

Tampak dalam laporan pengiriman pesan melalui Aplikasi Whatsapp konfirmasi yang disampaikan telah diterimanya dan juga telah dibaca oleh Manager Kebun Hatonduhan Jon Bangun.

Namun, sangat disesalkan tindakan pejabat sekelas Manager Unit Kebun Hatonduhan itu, ternyata Jon Bangun terkesan arogan dan alergi terhadap awak media, dibuktikan olehnya, bukan hanya enggan menanggapi, malah memblokir nomor kontak awak media ini.

(Amry Pasaribu)